

Konflik Antar Warga di Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara

Heni Ismiati¹, Muhammad Fedryansyah¹

¹Jurusan Magister Sosiologi FISIP Universitas Padjadjaran

Corresponding author : heni.ismiati16102014@gmail.com

Received : January 2017; Accepted; February 2016; Published : May 2017

Abstract

Conflicts in Tanjung Balai Asahan involving cultural violence. A conflict begins with the construction and placement of the Amithaba Buddha statues at the monastery Tri Ratna who are considered Muslims Tanjung Balai disturbing the comfort of their worship. Then there was the burning of the monastery took place on July 29, 2016, involving cultural sentiment. Related cultural community sentiment is due to the assumption that the existence of differences that could not be put together between the Malay Tanjung Balai versus ethnic Chinese. According to Galtung (1990), this cultural violence is violence that includes and is one of the roots of violence and structural violence directly. Cultural violence is an aspect of culture including religion and ideology, language, arts, science, and symbol-symbol of culture as myth, the concept eventually led to certain cultures, which is then the value in the culture that made the justification by the community against acts of violence or conflict. The Community will be no encouragement of manipulation and provocateur who utilize this condition so that there are issues that can be resolved to base became manifest and uncontrolled. Therefore, the harmonization within the community should be made, for instance by holding mutual charity program and thus the intermingling in the society.

Key Word: Conflict, Violent Culture, and Multiculturalism.

Abstrak

Konflik antar warga di Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara melibatkan kekerasan kultural. Konflik yang terjadi bermula dengan adanya pembangunan dan peletakan Patung Budha Amithaba di Vihara Tri Ratna yang dianggap warga Muslim Tanjung Balai mengganggu kenyamanan ibadah mereka. Kemudian terjadilah pembakaran Vihara yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2016 melibatkan sentiment budaya (kultural). Sentiment masyarakat terkait kultural ini disebabkan anggapan bahwa adanya perbedaan yang tidak dapat disatukan antara masyarakat Melayu Tanjung Balai Asahan dengan etnis Cina. Menurut Galtung (1990) kekerasan kultural merupakan kekerasan yang mencakup dan merupakan salah satu akar dari kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Kekerasan budaya (*cultural violence*) merupakan aspek dari kebudayaan termasuk agama dan ideology, bahasa dan seni, ilmu pengetahuan,

symbol-simbol budaya seperti mitos, konsep budaya tertentu, pribahasa yang kemudian nilai dalam budaya itu dijadikan pembenaran oleh masyarakat terhadap tindak kekerasan ataupun konflik. Ketika kondisi masyarakat rentan, menimbulkan dorongan manipulasi dan provokator yang memanfaatkan kondisi ini sehingga isu-isu yang ada menjadi manifest dan tidak terkendali. Oleh sebab itu harmonisasi dalam masyarakat harus dilakukan, misalnya dengan mengadakan gotong royong dan bakti sosial sehingga terjadi pembauran dalam masyarakat.

Key Word: Konflik, Kekerasan Budaya, dan Multikulturalisme.

PENDAHULUAN

Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara adalah salah satu wilayah Indonesia dengan masyarakat yang heterogen. Beberapa etnis masyarakat di Tanjung Balai yaitu Batak (42%), Jawa (17,06%), Melayu (15,41 %), Minang (3,58%), Aceh (1,11%), dan lain-lain (20,28%); dengan agama yang dianut adalah Islam (83,30%), Kristen (8,44%), Katolik (0,76%), Hindu (0,04%), Buddha (7,44%), dan Khonghucu (0%) (Irwansyah, 2013). *Multikulturalisme* telah terjadi sejak pemerintahan kolonial belanda di daerah ini. Perkembangan masyarakat dengan diikuti penambahan secara kuantitatif menjadikan Tanjung Balai Kota yang padat penduduk. Hal ini menjadikan *multikulturalisme* yang harusnya dapat diikat dalam satu *ke-binekaan* ternyata berubah menjadi sentimen kultural.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan di Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara berkaitan dengan sentiment kultural yaitu penelitian yang dilakukan oleh Karinamia (2007) tentang “Analisis Konflik Nelayan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara” menyebutkan bahwa terjadi konflik nelayan yang melibatkan kelas antar buruh (ABK) dengan pemilik (majikan) dan antar nelayan tradisional dengan nelayan modern. Konflik antar nelayan ini berakhir dengan unjuk rasa yang meminta nelayan modern untuk tidak masuk dalam wilayah penangkapan ikan nelayan tradisional (Karinamia, 2007). Sedangkan Irwansyah (2013) menyatakan bahwa ada potensi keretakan hubungan sosial Muslim-Buddhis di Kota Tanjung Balai Sumatera Utara, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan warga yang menyebabkan kecemburuan sosial kepada warga masyarakat Budhis di Tanjung Balai. Kenyamanan masyarakat Budha mulai terganggu, pada tanggal 30 Mei 2010 dan 29 Juli 2010 beberapa ormas yang mengatasnamakan “Gerakan Indonesia Bersatu” melakukan demosntrasi ke Kantor DPRD dan Walikota Tanjung Balai yang menuntut pemerintah untuk menurunkan Patung Buddha dengan alasan bahwa adanya patung tersebut tidak mencerminkan kesan Islam di kota Tanjung Balai dan dapat mengganggu keharmonisan masyarakat (Irwansyah, 2013).

Sejak tahun 2010 pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk meredam konflik yang berkembang laten pada masyarakat Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara. Salah satunya mengenai konflik agama yang menjadi pemicu pengrusakan tempat ibadah masyarakat Tionghoa di Tanjung Balai. Sensitifitas masyarakat Tanjung Balai terhadap masyarakat Tionghoa dimulai dengan pembangunan dan peletakan patung Budha di Vihara Tri Ratna. Meskipun pemerintah telah memberikan ijin atas pendirian bangunan ibadah tersebut melalui IMB yang dikeluarkan oleh Walikota dengan No. 648/237/K/2006. Dari persetujuan tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Masyarakat Muslim Tanjung Balai Asahan menuntut penurunan patung Buddha di Vihara Tri Ratna. Sehingga pemerintah dan pihak keagamaan mengeluarkan tujuh Surat edaran terkait penurunan patung Buddha tersebut. *Pertama*, Surat dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Sumut No. 60.0-1/FKU-]B-I/VI/2010 perihal proaktif masyarakat menyelesaikan permasalahan dan menjaga situasi agar tetap kondusif, tidak melakukan tindakan anarkis dan menjaga perdamaian. *Kedua*, Surat dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat (BIMMAS) Agama Budha dengan No.DJ.VI/3/BA.02/604/2010 yang ditujukan kepada Ketua Vihara Tri Ratna Kota Tanjung Balai. Dalam Surat tersebut masyarakat meminta untuk melakukan pemindahan patung Budha Amintabha ketempat yang lebih terhormat.

Ketiga, tanggal Surat dari Yayasan Vihara Tri Ratna Tanjung Balai dengan No. 05/YVTR-VI/2010 yang ditujukan kepada Menteri Agama Dirjen BINMAS Agama Budha. Surat tersebut menanggapi Surat Menteri Agama dimana Yayasan Vihara Tri Ratna menyesalkan Surat Menteri Agama yang meminta mereka untuk menurunkan Patung Budha. Sehubungan dengan hal tersebut, Yayasan Vihara Tri Ratna meminta Menteri Agama meninjau ulang Surat tersebut karena Patung Budha merupakan satu kesatuan dengan Vihara dan selama ini tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. *Keempat*, Surat dari Pengurus Daerah Majelis Budhaya Indonesia dengan No. 085/MDI-Sumut/VI/2010 yang ditujukan kepada Dirjen BIMMAS Umat Budha Kementerian Agama. Isi Surat ini adalah kekecewaan masyarakat beragama Budha atas Surat Dirjen BIMMAS kementerian agama yang tidak memihak kepada mereka.

Kelima, Surat dari Kementerian Agama RI Dirjen Binmas Agama Budha yang ditujukan kepada Ketua Vihara Tri Ratna dengan No. DJ.VI/3/BA.02/680/2010 perihal pencabutan Surat No. DJ.VI/3/BA.02/604/2010 dan dinyatakan tidak berlaku lagi. *Keenam*, Surat dari Kementerian Agama Dirjen Agama Budha No. DJ.VI/3/BA.02/361/2010 yang ditujukan kepada Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumut perihal mohon bantuan penyelesaian masalah Patung Buddha Vihara Tri Ratna agar dilakukan secara kekeluargaan. *Ketujuh*, Surat dari MUI Kota Tanjung Balai, ditujukan kepada Walikota Tanjung Balai dengan No.010/DP.11/S/VII/2010 perihal saran dan himbauan sehubungan dengan

adanya keresahan masyarakat Tanjung Balai yang ditandai dengan adanya unjuk rasa elemen-elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Islam Bersatu ke Kantor DPRD Tanjung Balai tanggal 30 Mei 2010 dan 29 Juni 2010 yang keberatan terhadap letak patung Budha Amitabha yang berada diatas lantai 4 Vihara Tri ratna di Jln. Asahan Kota Tanjung Balai. Hal ini menimbulkan rasa diskriminasi berkepanjangan pada masyarakat etnis Tionghoa yang beragama Buddha di Tanjung Balai.

Konflik kembali terjadi pada tanggal 29 Juli 2016, berupa pembakaran tempat ibadah yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Tanjung Balai. Dari data yang diolah peneliti, bahwa kerusakan yang diakibatkan dalam konflik tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.
Daftar Rumah Ibadah dan Panti Sosial yang Rusak Akibat Konflik

No	Vihara, Klenteng dan Yayasan	Alamat
1.	Vihara Tri Ratna, Kelenteng Ong Ya Kong, Kelenteng Dewi Samudra, Kelenteng Tua Pek Kong, Kelenteng Tiau Hau Biao (semua dibakar)	Jln. Asahan, Kelurahan Indra Sakti, Kec. Tanjung Balai Selatan
2.	Kelenteng Depan Kantor Pengadilan (dibakar)	Jln. Sudirman, Kelurahan Perwira, Kec. Tanjung Balai Selatan
3.	Vihara Avalokitesvara (dibakar)	Jln. Imam Bonjol, Kelurahan Indra Sakti, Kec. Tanjung Balai Selatan
4.	Kelenteng di Jln. MT Haryono (dibakar)	Jln. MT Haryono Kelurahan Perwira, Kec. Tanjung Balai Selatan
5.	Kelenteng Huat Cu Keng (dibakar), dan Klenteng di Jln. Juanda (dirusak)	Jln. Juanda, Kelurahan TB Kota I, Kec. Tanjung Balai Selatan
6.	Yayasan Sosial Kemalangan (dirusak)	Jln. Mesjid Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjung Balai Selatan

Sumber: dihipun dari data lapangan dan media sosial

Konflik yang melibatkan sentiment keagamaan dan *culture* yang telah berkembang laten di masyarakat Tanjung Balai Asahan bisa saja terjadi kembali jika tidak diselesaikan dan ditemukan penyebabnya. Oleh sebab itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: apakah faktor yang menjadi penyebab konflik antar warga di Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data primer yang digunakan yaitu observasi langsung dengan teknik wawancara, sedangkan data sekunder yaitu penelitian terdahulu, buku, ebook, jurnal, dan artikel lepas. Penelitian ini dilakukan semenjak tanggal 25 Oktober sampai dengan 20 Desember 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Konflik

Masyarakat tidak selamanya teratur sebagaimana yang dikehendaki teori fungsional struktural. Konflik terjadi ketika adanya dominasi, pertentangan berkaitan dengan kekuasaan, dan perbedaan kepentingan baik antara individu, kelompok atau golongan, dan masyarakat. Teori konflik membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Perbedaan Otoritas ini kemudian menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Karena adanya perbedaan kepentingan antar aktor sehingga perbedaan antara superordinasi dan subordinasi menimbulkan konflik. Kekuasaan dan wewenang menurut Dahrendorf menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam struktur (Jonson, 1986). Konflik merupakan perjuangan atas nilai-nilai dengan tuntutan status langka, kekuasaan, serta sumber-sumber dengan tujuan untuk menetralkan tujuan dari pihak lawan (Coser, 1956). Menurut Fisher konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih individu atau kelompok yang memiliki, atau merasa memiliki sarana-sarana yang tidak sejalan (Trijono, 2007).

Sedangkan menurut Johan Galtung, konflik dapat terjadi akibat benturan fisik dan verbal sehingga dapat memunculkan penghancuran. Konflik dapat dipahami sebagai sekumpulan permasalahan yang dapat menghasilkan penciptaan penyelesaian baru. Sedangkan kekerasan adalah situasi ketidaknyamanan yang dialami aktor dimana ketidaknyamanan adalah apa yang “seharusnya” tidak sama dengan apa yang “ada” bisa juga berupa suatu sikap yang ditujukan untuk menekan pihak lawan, baik secara fisik, verbal, ataupun psikologi (Galtung, 1996).

Konflik yang terjadi di Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara merupakan bentuk dari kekerasan yang dilakukan sejumlah warga terhadap etnis warga minoritas dalam hal ini warga Tionghoa. Kekerasan tersebut berupa tekanan non fisik dan pembakaran tempat ibadah mereka. Warga Tionghoa secara tidak langsung ditekan untuk tunduk kepada aturan yang dibuat oleh pihak-pihak mayoritas. Dalam teori konflik Johan Galtung menciptakan tiga dimensi konflik kekerasan, yaitu kekerasan langsung yang didasarkan atas kekuasaan sumber (*resource power*), kekerasan struktural yaitu berasal dari penggunaan kekuatan struktural, dan kekerasan budaya (Galtung, 2007). Berikut ketiga dimensi kekerasan tersebut dijelaskan dibawah ini:

- a. Kekerasan struktural (*structural violence*), kekerasan struktural didasarkan atas adanya ketidakadilan yang diciptakan oleh suatu sistem yang mana tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (*human needs*) atau masyarakat. Seperti rasa tidak aman karena tekanan lembaga-lembaga militer yang dilandasi oleh kebijakan politik otoriter, pengangguran akibat sistem, tidak menerima sumber daya manusia dilingkungannya,

diskriminasi ras atau agama oleh struktur sosial atau politik sampai tidak adanya hak untuk mengases pendidikan secara bebas dan adil. Juga manusia mati akibat kelaparan, dan tidak mampu mengakses kesehatan (Galtung, 1990)

- b. Kekerasan Langsung (*direct violence*) menurut Galtung (1990), merupakan tindakan kekerasan yang terjadi pada situasi langsung terlibat dalam situasi konflik dengan melakukan aksi yang dapat melukai, membunuh orang lain, seperti penyerangan sekelompok masyarakat terhadap komunitas atau kelompok masyarakat lainnya yang menimbulkan luka-luka serta meninggalnya anggota kelompok yang terlibat dalam penyerangan tersebut
- c. Kekerasan Budaya (*cultural violence*), bahwa kekerasan kultural ini merupakan kekerasan yang mencakup dan merupakan salah satu akar dari kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Dengan demikian kekerasan budaya berpeluang menjadi pemicu terjadinya kedua kekerasan tersebut (Galtung, 1990). Kekerasan budaya (*cultural violence*) merupakan aspek dari kebudayaan termasuk agama dan ideology. Bahasa dan seni, ilmu pengetahuan, symbol-simbol budaya seperti mitos, konsep budaya tertentu, pribahasa yang kemudian nilai dalam budaya itu dijadikan pembenaran oleh masyarakat terhadap tindak kekerasan ataupun konflik.

Dari ketiga dimensi kekerasan di atas dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan dasar yang jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi dapat menjadi ancaman terjadinya konflik. Faktor mendasar yang menjadi pendorong konflik adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan masyarakat yaitu berkaitan dengan kelangsungan hidup (pemenuhan kebutuhan); kesejahteraan (bentuk negatif: penderitaan, mobilitas); identitas, makna kebutuhan (penyangkalan: keterasingan); dan kebutuhan kebebasan (penyangkalan: represi) (Galtung, 1980). Galtung melihat konflik sebagai sebuah proses dinamis dimana struktur, sikap dan perilaku terus menerus merubah dan saling berpengaruh antara yang satu dengan yang lain. Ketika kepentingan berbagai pihak berbenturan atau ketika hubungan diantara mereka menjadi lebih bersifat agresif, para pihak yang terlibat dalam konflik kemudian membentuk berbagai struktur untuk mencapai kepentingan mereka. Mereka mengembangkan sikap permusuhan dan perilaku konflikual. Dari sinilah kemudian bentuk konflik mulai berkembang dengan intensif. Sebagaimana konflik berlangsung, sangat mungkin juga terjadi perluasan konflik kepada pihak-pihak lain, lebih mendalam dan lebih tersebar. Memunculkan konflik sekunder diantara pihak yang terlibat atau di dalam pihak lain yang ingin memperoleh keuntungan dari konflik itu. Pada akhirnya pemecahan konflik harus melibatkan serangkaian perubahan dinamis yang meliputi pencegahan perluasan perilaku konflik (*de-escalation of conflict behavior*), perubahan sikap dan transformasi hubungan

(*relationship*) atau benturan kepentingan yang semua itu merupakan inti dari struktur konflik (Susan, 2010).

Upaya Galtung dalam menganalisa konflik yaitu dengan memberikan penekanan pada aktor, isu dan proses dari konflik tersebut. Konflik Galtung telah memperlihatkan berbagai individu, kelompok, dan organisasi yang membawa berbagai kepentingannya masing-masing. Kepentingan dapat berupa kepentingan ekonomis maupun kepentingan politis. Galtung melihat konflik tersebut berupa kontradiksi-kontradiksi yang terjadi diantara pihak-pihak dalam mencapai tujuan dengan kepentingan-kepentingan yang ada pada diri masing-masing. Proses ini membawa pada bentuk perilaku-perilaku tertentu yang menciptakan kontradiksi dan situasi ketegangan. Galtung juga memperkenalkan konsep segitiga konflik dalam menganalisis terciptanya sebuah konflik.

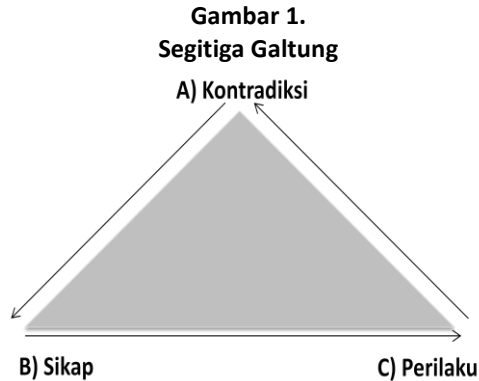
Analisis konflik yang dimaksud adalah analisis adanya hubungan sebab akibat atau interaksi yang memungkinkan munculnya sebuah konflik sosial. Galtung (2007) menginterpretasikan konflik dalam tiga komponen, yaitu A (*attitude*), B (*behavior*), dan C (*contradiction*) Terdapat rumusan dalam berlangsungnya konflik, yaitu: $C \text{ (conflict)} = A \text{ (attitudes)} + B \text{ (behavior)} + C \text{ (contradiction)}$. Galtung (Czyz, 2006) memiliki pemikiran bahwa model ini juga dapat digunakan untuk mengatasi konflik-konflik lain, seperti kekerasan keluarga, diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan konflik di sekolah. Secara umum, metode yang digunakan dalam menangani konflik bersifat merusak atau kekerasan. Namun, dengan adanya pemikiran orang banyak yang menganggap bahwa setiap konflik selalu berakibat kekerasan, Galtung mencetuskan sebuah teori yang dapat menjelaskan mengenai bagaimana konflik itu berlangsung.

Galtung (Webel & Galtung, 2007) menyatakan bahwa urutan terjadinya konflik yaitu: $C \rightarrow A \rightarrow B$, konflik dimulai secara obyektif dari dua pihak, mengambil bagian dalam pelaku konflik, kehidupan sikap, dan menemukan sesuatu dari luar, ekspresi perilaku, baik secara lisan atau fisik, kekerasan, atau tidak dengan kekerasan. Tetapi tidak menuntut kemungkinan urutan ABC yang lain juga dapat digunakan dan bersifat empiris. Hal tersebut dikarenakan ketiga komponen saling berpengaruh satu dengan yang lain. Berikut penjabaran ketiga unsur dalam segitiga konflik ABC Galtung:

- a. *Contradiction* (kontradiksi) adalah pertentangan tajam yang muncul pada konflik. Kontradiksi menjadi akar dari munculnya konflik. Sehingga kontradiksi dapat tercipta karena adanya unsur persepsi dan tindakan nyata dari kelompok-kelompok yang hidup dalam lingkungan sosial.
- b. *Attitude* (sikap) adalah bagaimana pihak yang berkonflik dalam merasakan dan berpikir terhadap konflik yang berkaitan dengan pihak konflik lain atau kelompok lain. Dengan kata lain dapat disederhanakan suatu sikap

atau persepsi dipicu oleh beragam hal yang berkaitan dengan kelompok lain.

- c. *Behavior* (perilaku) diartikan sebagai ekspresi ketika konflik terjadi baik secara verbal atau fisik (Czyz, 2006).



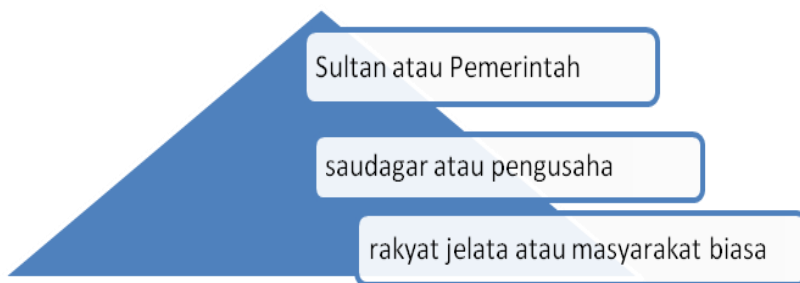
Ada tiga dimensi dalam segitiga konflik Galtung, yaitu sikap, perilaku, dan kontradiksi. Sikap adalah persepsi anggota etnis tentang isu-isu tertentu yang berkaitan dengan kelompok lain. Perilaku dapat berupa kerjasama, persaingan atau paksaan, dapat pula berupa gerakan tubuh yang menunjukkan persahabatan atau permusuhan. Kontradiksi adalah kemunculan situasi yang melibatkan problem sikap dan perilaku sebagai suatu proses, artinya kontradiksi diciptakan karena ada *stereotype* dan gerak etnis-etnis yang hidup dalam lingkungan sosial. Dapat diartikan juga bahwa sikap melahirkan perilaku, dan pada gilirannya melahirkan kontradiksi atau situasi. Sebaliknya situasi bisa melahirkan sikap dan perilaku (Susan, 2010).

Faktor Kultural pada Konflik di Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara

Tanjung Balai merupakan Kota tertua di Sumatera Utara yaitu sudah berumur sekitar 392 tahun. Kerajaan pertamanya yaitu Kerajaan Asahan yang dimulai dengan penobatan raja pertama disekitar kampung Tanjung tanggal 27 Desember 1620, dan tanggal 27 Desember kemudian ditetapkan sebagai “Hari Jadi Kota Tanjung Balai” dengan Surat keputusan DPRD Kota Tanjung Balai nomor : 4/DPRD/TB/1986 Tanggal 25 November 1986. Pertumbuhan dan perkembangan Kota Tanjung Balai sejak didirikan sebagai Gementee berdasarkan Besluit G.G. tanggal 27 Juni 1917 dengan Stbl.1917 No. 284, sebagai akibat dibukanya perkebunan-perkebunan di daerah Sumatera Timur termasuk daerah Asahan seperti H.A.P.M., SIPEF, London Sumatera (Lonsum) dan lain-lain, maka Kota Tanjung Balai sebagai kota pelabuhan dan pintu masuk ke daerah Asahan menjadi penting artinya bagi perekonomian Belanda. Kemudian datanglah pedagang-pedagang dari Gujarat, Cina, Tamil, Turkey dan juga penduduk yang didatangkan oleh belanda dari pulau Jawa, sehingga menjadikan Tanjung Balai menjadi salah satu daerah di Indonesia yang

masyarakatnya multikultur. Masyarakat Tionghoa sendiri masuk ke Tanjung Balai saat terjadinya krisis di Tiongkok mereka masuk kemudian karena pemerintah Belanda melihat daya saing masyarakat Cina ini dan khawatir akan ke eksistensian Belanda maka masyarakat ini kemudian membentuk koloni dan tinggal di sepanjang bantaran sungai Asahan, karena agama mereka mengenal adanya penyembahan terhadap dewa kesuburan atau dewa laut. Masyarakat Cina yang beragama Budha, memiliki strata sosial tertutup. Beberapa masyarakat di Tanjung Balai pada masa awal kerajaan dan sampai sekarang masih mempertahankan strata sosial yaitu:

Gambar 2.
Struktur statifikasi sosial dalam masyarakat Tanjung Balai



Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2016

Baik masyarakat pendatang dari beberapa daerah di Indonesia seperti Padang, Jawa dan Batak serta masyarakat pendatang dari Gujarat, Tamil dan Turki ataupun masyarakat asli Tanjung Balai saat ini sudah berakulturasi menjadi masyarakat melayu. Bahkan mereka tidak lagi menganggap mereka Batak atau Jawa atau Padang tapi mereka menyebut diri mereka warga Melayu. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat asli dengan masyarakat Indonesia pendatang. Masyarakat Melayu Tanjung Balai terkenal dengan keharmonisan dan toleransinya sehingga mereka cepat sekali menerima masyarakat pendatang masuk kedalam lingkungan masyarakat lokal (Reid, 2009).

Sedangkan masyarakat Cina di Tanjung Balai, berbeda dengan masyarakat Cina seperti halnya di Pulau Jawa. Masyarakat ini mempunyai kecenderungan tertutup serta memiliki kelas sosial (disebut sebagai kasta) yang berlaku tersendiri bagi warga Tionghoa Tanjung Balai. Perbedaan juga terlihat dari bahasa yang digunakan, masyarakat Tionghoa di Tanjung Balai seringkali menggunakan bahasa mereka dalam berinteraksi dengan sesama warga Tionghoa. Sikap tertutup inilah yang menjadi pemicu kecemburuan sosial pada suku lainnya sehingga timbul eksklusivitas pada masyarakat Tionghoa Tanjung Balai Asahan. Kecenderungan masyarakat Cina yang memiliki kemampuan berdagang dan adanya marginalisasi, membentuk mereka lebih giat dalam perekonomian yaitu perdagangan. Masyarakat ini sebenarnya memiliki

sensitivitas sangat tinggi dan kekerabatan yang kuat sesama etnisnya. Cina di Tanjungbalai adalah pemegang kendali roda perekonomian masyarakat sedangkan masyarakat pribumi sebagian menjadi pekerja atau buruh pada took-toko milik warga Tionghoa. Kehidupan sosial pada masyarakat Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara yaitu sebagai berikut:

1. Sektor Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Tanjung Balai yaitu perkebunan, perdagangan dan nelayan. Interaksi sosial-ekonomi pada masyarakat Tanjung Balai pada mulanya dilalui sebagai buruh perkebunan yang didirikan oleh Belanda. Kemudian masuk para saudagar dari Gujarat dan Tamil. Lalu ketika di Tiongkok pecah krisis masuklah orang-orang Tionghoa ke Tanjung Balai. Karakter masyarakat Cina yang merupakan pedagang membuat mereka mampu mengembangkan diri ditengah masyarakat. Sikap giat bekerja yang dibawanya menjadikan tingkat adaptasi dan bertahan hidup masyarakat dalam hal ekonomi lebih baik dari pada masyarakat pribumu. Sehingga mereka mampu menguasai perekonomian di Tanjung Balai bahkan saat ini banyak masyarakat Tanjung Balai yang bekerja pada masyarakat Tionghoa ini. Penghasilan masyarakat yang paling diminati adalah sebagai nelayan. Produksi perikanan laut sebesar 34,564 ton pada tahun 2005 dan hasil air tawar sebesar 31,23 ton dan 17,28 dari budi daya air tawar (Karinamia, 2007). Namun yang menjadi permasalahan adalah ternyata dari sekian banyak kapal besar (tidak lebih dari 30GT) nelayan yang tersedia dalam survey yang dilakukan oleh Karimana (2007) bahwa kepemilikan kapal berada pada masyarakat Cina. Masyarakat melayu Tanjung Balai ada pula yang berasal dari Jawa hanya sebagai nahkoda, anak buah kapal, dan pengurus kapal. Sistem pengupahan diterima pada saat alat tangkapan kapal digunakan yaitu dengan system bagi hasil 50% untuk nahkoda 50% untuk ABK setelah dipotong dengan pemilik kapal. Sedangkan pada sektor perdagangan lebih banyak di kuasai oleh etnis Cina.

2. Sektor Publik

Dalam kaitannya dengan sektor publik masyarakat pribumi masih menempati sektor-sektor formal ini. Namun mulai muncul persepsi negative bahwa pemerintah selalu memihak kepada masyarakat kaya dalam hal ini masyarakat etnis Cina. Hubungan pemerintah yang notabene adalah Muslim dengan masyarakat Buddhis terjalin sangat baik, bahkan menurut pengakuan salah seorang guru agama Buddha yang kini mengabdikan di Vihara Tri Ratna, Walikota terpilih Drs. H.M. Thamrin Munthe, M.Hum., didukung oleh masyarakat Buddhis, padahal dia adalah alumnus dari IAIN Sumatera Utara dan seorang ulama Muslim. Sehingga memunculkan persepsi masyarakat bahwa

ada unsur politic patron klien antara walikota Tanjung Balai dengan pemerintah.

3. Sektor Sosial-Budaya

Sebelum berdirinya Patung Buddha di Vihara Tri Ratna, interaksi sosial Muslim-Buddhis di Kota Tanjung Balai cukup baik. Beberapa orang Buddha ada yang mengadopsi anak dari keluarga Melayu Muslim sebagai anaknya, menyekolhkannya di sekolah kelautan serta mempekerjakannya sebagai nakhoda kapal. Tidak ada masalah keagamaan sebelumnya, namun ketika pemerintah mengizinkan masyarakat agama Budha membangun patung dan meletakkan di Vihara mereka mulailah muncul serangkain isu yang beredar di masyarakat bahwa simbol keagamaan di Tanjung Balai sudah berubah. Menurut masyarakat Muslim sebagai masyarakat mayoritas di Tanjung Balai dengan adanya Patung Budha tersebut, kesan Islam yang ditimbulkan selama ini telah hilang.

Berdasarkan teori konflik Galtung bahwa permasalahan di atas termasuk kedalam kekerasan budaya (*cultural violence*) yang merupakan aspek dari kebudayaan termasuk agama dan ideology, bahasa dan seni, ilmu pengetahuan, symbol-simbol budaya seperti mitos, konsep budaya tertentu, pribahasa yang kemudian nilai dalam budaya itu dijadikan pembenaran oleh masyarakat terhadap tindak kekerasan ataupun konflik. Ketika kondisi masyarakat rentan, menimbulkan dorongan manipulasi dan provokator yang memanfaatkan kondisi ini sehingga isu-isu yang ada menjadi manifest dan tidak terkendali.

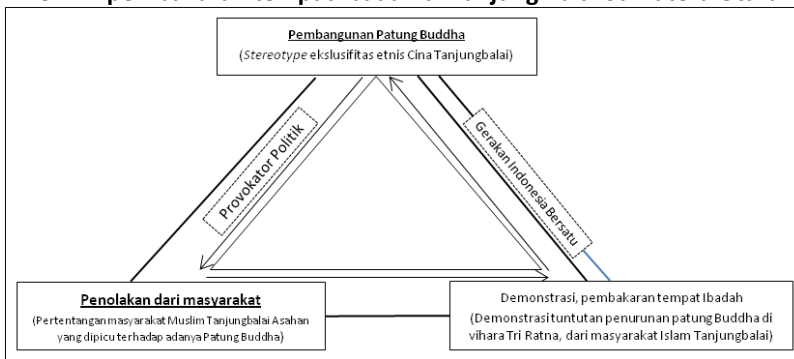
Kekerasan kultural yang dapat dilihat adalah bahwa adanya *stereotype* masyarakat etnis Cina adalah penguasa perekonomian. *Stereotype* bahwa Cina hanya mau bekerjasama dengan sesame etisnya. Hal ini dilihat dari tidak berbaurnya masyarakat etnis Cina dalam setiap kegiatan sosial kemasyarakatan yang diadakan oleh masyarakat Melayu. Bahwa mereka adalah masyarakat yang selalu menjadikan diri mereka eksklusif, dengan adanya sistem kekerabatan dan kasta tersendiri yang hidup dalam lingkaran etnis Cina. Sejarah bahwa masyarakat etnis Cina adalah masyarakat pendatang dan kemudian dominan dalam perekonomian menjadi arah bahwa masyarakat lokal tidak memperoleh peluang dalam wilayahnya sendiri.

Permasalahan di atas dimanfaatkan oleh beberapa oknum politik dalam mencapai kekuasaan. Kecemburuan sosial atas perbedaan kelas, penguasaan atas ekonomi dan keberpihakan pemerintah atas masyarakat Cina yang disimbolkan dengan perizinan pembangunan tempat ibadah yang mampu menampung 2000 orang yaitu vihara Tri Ratna dengan peletakan patung buddha setinggi dua meter sehingga menjadi objek simbol kota Tanjung Balai Asahan.

Tekanan yang dihadapi oleh etnis Cina semakin kuat ketika hal ini dimotori oleh organisasi massa yang melakukan demonstrasi menuntut penurunan patung Buddha di vihara tersebut. Tekanan ini memicu masyarakat etnis Cina mengalami kekerasan struktural. Pemerintah turut menekan masyarakat etnis Cina Buddha untuk menurunkan patung Buddha yang dianggap sebagai simbol melalui tokoh keagamaan. Hal ini tentu menjadi diskriminasi politik sebab belum diadakannya *Forum Goup Discussion* antara warga masyarakat Asahan dengan Masyarakat etnis Cina. Namun pemerintah telah menekannya dengan mengeluarkan Surat keputusannya agar masyarakat Cina menurunkan Patung yang dianggap Simbol Tuhan.

Kebutuhan bertahan pada masyarakat minoritas untuk tidak menurunkan sendiri patung Buddha menjadi rasional ketika telah terjadi konflik. Submisi eksklusifitas, bahwa mereka adalah masyarakat yang lebih beretika muncul. Hal ini menimbulkan *stereotype* masyarakat, yaitu kekuatan toleransi masyarakat Cina. Sedangkan kebutuhan bertahan masyarakat lokal adalah mempertahankan wilayah ekonomi yang selalu melihat *stereotype* etnisitas bahwa etnis Cina adalah etnis yang dominan dalam perekonomian. Dinamika konflik akibat dialektika kenyataan dan kekuasaan bercampur, ketika kekerasan kultural ini kemudian dimanfaatkan untuk mencapai kekuasaan. Sehingga muncul menjadi kekerasan langsung karena masyarakat sebelumnya tidak ada kontrol. Kebijakan penyelesaian konflik laten yang diambil oleh pemerintah sulit mencapai kesepakatan karena kedua belah pihak berusaha untuk saling mempertahankan kebutuhan dasarnya.

Gambar 3.
Konflik pembakaran tempat Ibadah di Tanjung Balai Sumatera Utara



- Hubungan konflik
- Arus konflik
- Kerjasama

Bagan di atas menunjukkan dinamika konflik penempatan patung Buddha di Vihara Tri Ratna yang menjadi pertentangan dan melahirkan sikap penolakan. Penolakan tersebut ada unsur politik yang memicu masyarakat untuk melakukan serangkaian perilaku atau tindakan demonstrasi yang

dimotori oleh gerakan Indonesia bersatu. Sehingga ketika masyarakat memperoleh dukungan dari berbagai pihak sebagai pihak mayoritas, mereka merasa mempunyai hak dan membenarkan tindakannya atas kekerasan yang mereka lakukan.

KESIMPULAN

Kekerasan budaya (*cultural violence*) merupakan aspek dari kebudayaan termasuk agama dan ideology, bahasa dan seni, ilmu pengetahuan, symbol-simbol budaya seperti mitos, konsep budaya tertentu, pribahasa yang kemudian nilai dalam budaya itu dijadikan pembenaran oleh masyarakat terhadap tindak kekerasan ataupun konflik. Ketika kondisi masyarakat rentan, menimbulkan dorongan manipulasi dan provokator yang memanfaatkan kondisi ini sehingga isu-isu yang ada menjadi manifest dan tidak terkendali.

Penyebab konflik antar warga di Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara adalah faktor kultural, yaitu timbulnya *stereotype* terhadap etnis Cina bahwa mereka telah mendominasi perekonomian wilayah Tanjung Balai. Ada perlakuan khusus pada etnis Cina dengan diizinkan pembangunan patung Buddha di Vihara Tri Ratna dan kesenjangan status kekerabatan yang tertutup pada masyarakat etnis Cina Tanjung Balai. Masyarakat etnis Cina di Tanjung Balai cenderung tertutup, tidak suka bergaul dalam partisipasi ketika masyarakat mempunyai kegiatan kemasyarakatan, seperti gotong royong sehingga masyarakat menilai ada eksklusifitas etnis Cina sebagai etnis pendatang dalam lingkup wilayah sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Coser, L. A. (1956). *The Function of Social Conflict*. Glencoe, Ill: Free Press.
- Cyz, A. M. (2006). Applying the ABC Conflict Triangle to the Protection of Children's Human Rights and the Fulfillment of their Basic Needs: A Case Study Approach. Master Thesis: Australia.
- Galtung, J. (1980). *The Basic Need Approach*. Cambridge: University of Oslo.
- Galtung, J. (1990, Agustus). The Violence of Culture. *Journal of Peace a Research*, Volume 27 (3), 1990: 291-305.
- Galtung, J. (1996). *Peace and Conflict, Development and Civilization*. London: Sage Publication.
- Galtung, J. (2007). *Peace by Peaceful Conflict Transformation the TRANSCEND Approach dalam Handbook of Peace and Conflict Studies (Charles Webel & Johan Galtung, ed.)*. London and New York: Routledge.

- Irwansyah. (2013, Desember 2). Potensi Keretakan Hubungan Sosial Muslim Buddhis. *Jurnal "Analisa"*, Volume 20 (02), 2013: 155-168.
- Jonson, D. P. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT Gramedia.
- Karinamia, R. (2007). Analisis Konflik Nelayan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara. Bogor, Jawa Barat, Indonesia.
- Mailin. (2016). Konflik dan Media Sosial (Konflik di Kota Tanjungbalai Sumatera Utara). *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 8 (2), 2016: 1-9.
- Reid, A. (2009). *Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Susan, N. (2010). *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Trijono, L. (2007). *Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Webel, C., & Galtung, J. (2007). *Handbook of Peace and Conflict Studies*. London and New York: Routledge.